

KSSK Siap Jalankan Mandat UU PPKSK Mengenai Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan

Siaran Pers

Nomor: 1/KSSK/Pers/2016

Jakarta, 13 Mei 2016 – Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan (UU PPKSK),¹ Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) hari ini menyelenggarakan rapat KSSK yang pertama bertempat di Gedung Djuanda, Kementerian Keuangan. KSSK yang beranggotakan Menteri Keuangan, Gubernur Bank Indonesia, Ketua Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan, dan Ketua Dewan Komisiner Lembaga Penjamin Simpanan, menyatakan siap menjalankan mandat UU PPKSK untuk melaksanakan kepentingan dan ketahanan negara di bidang perekonomian, khususnya dalam menyelenggarakan pencegahan dan penanganan krisis sistem keuangan. Dalam rapat perdana ini, KSSK membahas antara lain status stabilitas sistem keuangan, rencana kerja KSSK tahun 2016, serta persiapan *Financial Sector Assessment Program* (FSAP).

Berdasarkan hasil pengamatan dan asesmen yang dilakukan oleh empat lembaga anggota KSSK, KSSK menetapkan bahwa stabilitas sistem keuangan di triwulan I tahun 2016 dalam kondisi baik dan terkendali. Hal ini didukung oleh meredanya ketidakpastian perekonomian global dan perkembangan ekonomi domestik yang positif.

Dalam rangka implementasi UU PPKSK, rapat KSSK menyepakati rencana kerja KSSK tahun 2016 yang mencakup:

1. jadwal rapat berkala KSSK 1 (satu) kali setiap 3 (tiga) bulan dan rapat berikutnya akan dilaksanakan pada tanggal 28 Juli 2016;
2. penyusunan tata kelola KSSK, kode etik KSSK serta organisasi dan tata kerja Sekretariat KSSK;
3. simulasi penanganan krisis pada triwulan III tahun 2016; dan
4. sosialisasi UU PPKSK;
5. koordinasi untuk penyiapan peraturan pelaksanaan UU PPKSK yang menjadi tugas dan wewenang masing-masing anggota KSSK berupa Peraturan Pemerintah, Peraturan BI, Peraturan OJK, serta Peraturan LPS.

Dalam rangka penataan sektor keuangan secara berkelanjutan dan pelaksanaan komitmen Indonesia selaku anggota G-20, FSAP Indonesia yang kedua akan dilaksanakan mulai tahun ini, setelah FSAP yang pertama dilaksanakan pada tahun 2009/2010. Tujuan FSAP adalah menilai perkembangan dan ketahanan sektor keuangan nasional secara komprehensif. Tim kerja nasional FSAP yang dikoordinir oleh Otoritas Jasa Keuangan dalam rapat KSSK ini menyampaikan rencana kerja dan perkembangan persiapan FSAP. FSAP *Team* dari IMF dan World Bank direncanakan akan datang ke Indonesia tanggal

¹ UU PPKSK dapat diunduh melalui <http://www.fiskal.kemenkeu.go.id/>

30 Mei s.d. 3 Juni 2016 untuk membahas ruang lingkup (*scoping*) dari pelaksanaan FSAP di Indonesia. Keberhasilan program FSAP ini sangat penting guna memotret kekuatan sektor keuangan Indonesia serta berbagai kekurangan yang perlu untuk segera dibenahi. Oleh karena itu, KSSK mengamanatkan Tim kerja nasional FSAP dapat melaksanakan tugas sebaik-baiknya dengan dukungan penuh dari lembaga dan industri jasa keuangan yang terlibat dalam program ini.

* * * * *

Untuk informasi lebih lanjut:
fkssk@fiskal.depkeu.go.id